



Edukasi Soal TB di Transportasi Publik

FSTPI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI, dan Johnson & Johnson Indonesia menggelar edukasi tuberkulosis di 10

halte transjakarta koridor Blok M-Kota, Rabu (7/12/2016). Edukasi oleh 100 relawan, yang berasal dari karyawan J&J dan kader CEPAT-LKNU, meliputi pemaparan bahaya TB dan bagaimana pencegahannya, salah satunya menutup mulut/pakai masker saat batuk. Sebanyak 450.000 penumpang 1.300 bus transjakarta per hari berpotensi tertular TB. “Kami inginkan Jakarta bebas TB,” kata Plt Gubernur DKI Sumarsono. Sementara Ketua FSTPI Arifin Panigoro mengatakan, edukasi kepada publik seperti ini akan terus dilakukan.



UKM Berkomitmen Kendalikan TB

Saat ini anggota koperasi berjumlah 37 juta (2015). Berdasarkan angka insidens 399 per 100.000, maka diestimasi setiap tahunnya terjadi 129.130 kasus baru

diantara anggota koperasi. Ini belum termasuk karyawan yang bekerja di 59,3 juta unit usaha. Hal ini mengemuka pada lokakarya FSTPI bersama CEPAT-LKNU, Johnson-Johnson, dan CCPHI bertema “Peran Dunia Industri dalam Pengendalian TB Indonesia”, Rabu (14/12/2016), di Griya Jenggala 1 No 2, Jakarta Selatan. Hasil lokakarya ini berupa komitmen pengendalian TB oleh dunia usaha, menurut *Executive Secretary* FSTPI, drg. Mariani Reksoprodjo, akan dirumuskan sebagai rekomendasi kepada pemerintah.

Diskusi Kemitraan TB bersama layanan kesehatan swasta, 11 Januari 2017.

Newsletter ini diterbitkan oleh:

Forum Stop TB Partnership Indonesia
 Jl. Sultan Iskandar Muda
 No.66A, Kebayoran Lama Utara
 Jakarta Selatan 12240
 Telp/Fax : (021) 7397494
 www.stoptbindonesia.org

CEPAT-LKNU
 Grha Tirtadi Lt 5
 Jl. Raden Saleh No 20,
 Jakarta Pusat
 Telp: 021-39837388
 www.cepat-lknu.org

CCPHI
 Ariobimo Sentral 4th floor
 Jl. H.R. Rasuna Said
 Kav X-2 No. 5, Jakarta 12950
 T: 021-5290 9113
 F: 021-252 5760
 www.ccpchi.org

#POSTER TB

TUBERKULOSIS (TB) BISA DISEMBUHKAN

“Aku ingin hidup seribu tahun lagi!”
 Chairil Anwar (1922-1949)



DUNIA

9,6 juta orang sakit karena TB
1,5 juta orang meninggal karena TB

Laporan WHO 2015

INDONESIA

100,000 orang meninggal karena TB, setiap tahun
273 orang meninggal karena TB, setiap hari

Survei Pravelensi TB oleh Badan Litbangkes Kemenkes RI Tahun 2013-2014

Didukung oleh:



HEADLINE

TANGANI TB, LSM PERLU BERMITRA

Melihat besarnya beban Indonesia dalam menanggulangi tuberkulosis (TB), terutama masih tingginya angka kematian dan temuan kasus baru per tahun, peran semua pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan (*civil society organization/CSO*), sangat diperlukan. Peran LSM, bekerja sama dengan pemerintah dan swasta, diperlukan terutama dalam menemukan kasus, mendiagnosis, dan mendukung kepatuhan pasien untuk berobat TB hingga pasien sembuh.



Kader TB CEPAT-LKNU Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

Sejauh ini, LSM yang berupa organisasi profesi, keagamaan, kelompok pasien, baik lokal, nasional, maupun internasional dengan jejaringnya, telah memberikan kontribusi besar dalam pemutusan mata rantai penyebaran TB di Indonesia dan dunia.

Sekadar contoh, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), Aisyiyah

(Muhammadiyah), dan Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki) adalah contoh organisasi berbasis keagamaan yang melakukan kegiatan secara aktif memberantas TB di beberapa provinsi di Indonesia. Jalur keagamaan dijadikan basis dalam melaksanakan misi mengendalikan TB.

Selain itu ada juga LSM non-keagamaan, seperti Perkumpulan Pemberantasan

Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Perkumpulan Pasien dan Masyarakat Peduli TB (Pamali), Jaringan Peduli Tuberkulosis Indonesia (Japeti), Pejuang Tangguh (Peta), dan banyak lagi yang lain, yang terus berkiprah dalam gerakan stop TB.

LSM ini telah memberi sumbangan berharga, dengan kapasitas masing-masing, dalam upaya pengendalian TB di Indonesia. LKNU, misalnya, lewat program CEPAT-LKNU, telah terlibat dalam upaya pengendalian TB di 3 provinsi dengan dukungan pendanaan dari USAID. Demikian juga Aisyiyah yang berperan aktif dalam Program Penanggulangan TB berbasis masyarakat dengan dukungan dana dari Global Fund.

Kepedulian LSM terhadap TB bukan tanpa hambatan. Selain dari sisi jumlah dan kapasitas yang tidak merata di setiap wilayah, juga hambatan berupa kekurangan dana. Sejauh ini, gerakan anti TB oleh LSM masih mengharapkan bantuan donor.

Adapun yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah belum maksimalnya mekanisme pencatatan kontribusi kelompok masyarakat dalam Sistem Informasi TB Terpadu (SITT). Ke depan diharapkan, situs web www.sittindonesia.org terus dikembangkan sehingga bisa menghimpun semua laporan terkait kasus TB di seluruh Nusantara secara valid dan maksimal. (*)



Dr. Asik Surya, MPPM - Kepala Subdirektorat TB Kemenkes RI

PERAN LSM SANGAT PENTING DALAM PENGENDALIAN TB

Di sela-sela lokakarya Peran Dunia Industri dalam Pengendalian TB di Indonesia, di Griya Jenggala I No 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kepala Subdirektorat TB Kementerian Kesehatan dr Asik Surya, MPPM, Rabu (14/12/2016), berkenan berbagi terkait peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan harapan pemerintah terhadap LSM dalam upaya pengendalian TB di Indonesia.

Salah satu permasalahan pengendalian TB di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan pemerintah. Masyarakat perlu diberi tahu dan didampingi untuk memanfaatkan fasilitas yang ada.

“Peran *mengayo-ayo* ini wilayahnya LSM. Memberi tahu, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan

semua fasilitas yang diberikan pemerintah, misalnya ‘TB itu bisa disembuhkan lho. Obatnya disediakan dan gratis pula. Pengobatan TB harus sampai tuntas selama 6 bulan hingga 8 bulan’. Jadi, sekali lagi, peran LSM sangat dibutuhkan” kata Asik.

Lalu insentif apa yang didapatkan LSM? Menurut Asik, LSM akan memperoleh insentif, yang tentu tidak selamanya berbentuk nominal uang. Ketika sebuah LSM konsisten memberikan perhatian pada TB, dengan sendirinya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Sekadar contoh, LSM yang memiliki klinik pengobatan TB, dengan kampanye di kliniknya, ‘pengobatan TB di klinik ini gratis’, meskipun obatnya diperoleh dari pemerintah, otomatis akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. “Mendapatkan kepercayaan masyarakat itu tidak mudah, lho,” kata Asik.

LSM keagamaan seperti Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dengan program CEPAT, Aisiyyah

(Muhammadiyah), Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki), selama ini diketahui peduli pada TB dan HIV, telah mendapatkan kepercayaan, baik dari dunia internasional maupun pemerintah, untuk menjalankan proyek atau program-program pengendalian TB di Indonesia.

Dijelaskan Asik, LSM juga perlu berperan mengawal pemerintah, termasuk di daerah, dalam pembuatan regulasi-regulasi guna memastikan pengendalian TB terlaksana sesuai yang diinginkan. LSM perlu memastikan pemerintah daerah memasukkan program pengendalian TB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk penyediaan dana untuk mengantisipasi bantuan donor yang terbatas.

Intinya, kata Asik, gerakan yang terus dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pengendalian TB harus terus dilakukan dan didukung. “Kami di pemerintahan bertugas sebagai pengarah (*steering*) demi visi Indonesia bebas TB pada 2035,” ujarnya.

Terkait pelaporan TB, Asik menilai, wajib dilakukan secara terintegrasi mulai dari puskesmas diteruskan ke dinas kesehatan di tingkat kabupaten yang langsung menginput data ke dalam Sistem Informasi TB Terpadu (SITI). Kata Asik, “Coba bayangkan jika tidak ada data yang rapi. Pemerintah pasti akan kesulitan melakukan perencanaan, misalnya penyediaan obat.”

Preventing TB is everyone's business. TB adalah tanggung jawab semua. Mari temukan TB dan obati sampai sembuh (TOSS) setiap terduga TB di sekeliling kita. Begitu pesan Asik Surya mengakhiri paparannya. (*)



Pemetaan - Kader PPTI Cimahi membuat pemetaan per kelurahan

METODE BERBASIS PETA ANDALAN PPTI CIMAHY YANG MENDUNIA

Ingat pepatah, lain lubuk lain ikannya; Lain daerah lain adatnya. Agaknya ini juga berlaku pada metode pengendalian TB di Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI) Cabang Kota Cimahi, Jawa Barat, yang berbeda ketimbang daerah lain. Para kader TB di 312 RW di 15 kelurahan di Kota Cimahi menerapkan metode pengendalian TB berbasis peta kreasi kader. Sukses metode ini pun mendunia.

Poster presentation terkait metode ini disampaikan oleh dr. Fitriani Manan saat *45th World Conference on Lung Health of The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union)* di Barcelona, Spanyol, 28 Oktober-1 November 2014, pun dicatat dalam *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease Volume 18*.

“Setiap kader di RW menggambar peta yang menunjukkan wilayah kerja si kader TB. Di peta itu diberikan tanda, di mana ada TB anak, di mana ada TB dewasa, posisi puskesmas, letak si kader itu berada, berapa orang, dan sebagainya. Peta ini diperbarui sekali 3 bulan. Berdasarkan peta itu,

para kader menganalisis. Teorinya, pada peta keempat seharusnya ada perubahan,” kata drg. Mariani Reksoprodjo, yang merupakan *Executive Secretary* FSPTI itu, Selasa (13/12/2016).

Menurut Mariani, metode yang dilakukan oleh kader TB Cimahi bisa menjadi model bagi kader di wilayah lain. Lewat peta itu, setiap kader menjadi terpacu untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketua PKK di kelurahan yang menjadi koordinator kader akan mengingatkan setiap kader ketika di peta belum mencapai target, misalnya dalam mencari pasien terduga TB.

Di kota dengan jumlah penduduk 594.021 jiwa itu pada 2016 jumlah estimasi kasus TB menular (TB BTA positif) sebanyak 636 orang dengan target presumtif TB mencapai 6.356 orang. Angka tersebut berdasarkan *incidence rate* 107/100.000 penduduk. Bila mengacu pada *incidence rate* tahun 2015 sebesar 399/100.000 penduduk, maka PPTI Cimahi beserta para kadernya harus bekerja lebih keras lagi.

Sejauh ini, berdasarkan data, tahun ini penjangkaran presumtif TB mencapai

774 kasus, pengobatan (53 kasus), selesai pengobatan (67 kasus). Pengurus PPTI Cimahi yang diketuai dr. Zakaria Ansyori terus berjejaring dengan pemerintah, swasta, penyedia layanan, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan lapisan masyarakat lainnya untuk pemberantasan TB.

Hal yang menggembirakan dari Cimahi ini adalah eforia para kader yang bangga dan antusias menjadi kader TB. Ini jarang ditemukan di tempat lain. Setiap Hari TB Sedunia para kader menggelar berbagai kegiatan, seperti lomba cerdas cermat kader, senam paru-paru bersama, dan melakukan *role play* pengendalian TB.

“Tidak itu saja, yang menggembirakan lagi bahwa alokasi dana pengendalian TB dari pemerintah kota naik signifikan, misalnya Rp 42.691.500 pada 2010 naik menjadi Rp 194.424.550. Artinya, perhatian pemerintah daerah sudah ada untuk mempercepat pengendalian TB”. Hal ini juga disampaikan oleh Mariani Reksoprodjo, Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat PPTI, yang mewakili Pemkot Cimahi dalam *Oral presentation* pada *Conference on Lung Health of The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union)* di Barcelona, 2014. (*)